

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku :

Andi Sofyan, 2016, Nur Azisa, Hukum Pidana, Penerbit : Pustaka Pena Press, Makasar

Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), Yogyakarta.

H. Sugianto, 2018, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*, Penerbit Deepublish, Sleman Yogyakarta

H. Suyanto, 2018, Hukum Acara Pidana, Penerbit : Zifatama Jawa, Sidoarjo

Ismu Gunadi dan kawan-kawan, 2011, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta

Didik Endro Purwoleksono, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit : Airlangga University Press, Surabaya

Riadi Asra Rahmad, 2019, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit : PT. Rajawali Press, Depok

Topo Santoso, 2001, *Pengertian Pemalsuan Surat*, Mandar Maju, Bandung

Yanto M.P. Ekon, Modul Hukum Acara Pidana

Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, CV, Rajawali, Jakarta

### Sumber Jurnal :

Haris Fakhri, Arief Wisnu Wardhana, Cahyadi, Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Dalam Dokumen Kontrak, Juenal Doctrinal: Vol. 4 no. 1 Maret 2019, Hlm. 961-963

I Gede Eka Suantara, I Nyoman Gede Sugiartha, Ni Made Sukaryati Karma, Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Secara Bersama-Sama, Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 1–Maret 2022, Hal.122

Cahaya Andika, Penegakan Hukum Terhadap Manipulasi Data Kependudukan Dikabupaten Malaka, Jurnal Lawnesia, Volume 1 (2), Desember 2022, Hal. 140.

Dian Pratiwi Ahmad, Marnan A. T. Mokorimban, Ronny Sepang, Kajian Hukum Tentang Pemalsuan Surat Dalam Hukum Positif Di Indonesia, Jurnal Unsrat, Hal. 3

Hadi Tirto Bisono, Andy Usmina Wijaya, Farhan Saleh, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Hak Milik Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 76/Pid.B/2021/PN.Drh), Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Volume 1, Nomor 1 Tahun 2023, Hlm. 21-22

Cici Indrawati, Berchah Pitoewas, Muhammad Mona Adha, Pengaruh Kesadaran Kelengkapan Kepemilikan Surat Tanda Kendaraan Bermotor Terhadap Aspek Tanggung Jawab Warga Negara Di Kelurahan Rumbih, Jurnal PEKAN Vol.7 No.2 Edisi November 2022, Hal. 91

**Sumber Peraturan Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor